

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, diantara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia. Berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam proses penanganan bencana mulai dari sebelum dan sesudah terjadinya bencana alam. Sadar akan posisi sebagai negara rawan bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB adalah sebuah lembaga Pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam melakukan Penanggulangan Bencana sesuai dengann amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.¹

Dalam hal penanggulangan bencana tentunya peran pemerintah sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana dalam Undang-Undang ini menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.² BPBD dibentuk berdasarkan

¹ Nahrul Fhadillah (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Jambi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Syariah. Univesitas Thaha Saifudin Jambi. Halaman 1.

² Undang-undang No. 23 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 pasal 75 ayat 1 sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota maka dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rekonstruksi dan Rehabilitasi sebagai sebuah upaya dalam rangka perbaikan dan pemulihan semua aspek pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana. Rekonstruksi dan Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.³

Berbagai kejadian bahaya alam, yaitu bencana geologi (gempa, gunung api, longsor, tsunami) dan hidro meteorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya). Kejadian bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan diikuti tanah longsor. Kondisi morfologi di Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadinya banjir di Indonesia setiap musim penghujan. Potensi terjadinya bencana banjir dipengaruhi juga oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah

³Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rekonstruksi dan Rehabilitasi.

dibandingkan muka air laut untuk itu bencana banjir sudah menjadi isu nasional yang seakan tidak dapat diatasi lagi di Indonesia.

Faktor kondisi alam tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak langsung. tingkah laku manusia yang tidak menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penebangan hutan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan peningkatan aliran air ke permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah suatu wilayah sungai. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Indonesia setiap tahunnya terbukti menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi.⁴

Kabupaten Flores Timur yang memiliki luas wilayah 5.983,38 km² terdiri dari luas wilayah daratan 1.812,85 km², menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak bencana pada tanggal 4 April 2021, nyatanya juga banyak menelan korban jiwa. Layaknya bencana rutin tahunan, masyarakat Kabupaten Flores Timur menganggap banjir akan sama seperti tahun sebelumnya tanpa persiapan khusus, mereka tidak menduga bahwa musim hujan di tahun 2021, membawa banjir besar yang kemudian menjadi bencana yang sangat menyedihkan dalam sejarah bencana Kabupaten Flores Timur khususnya untuk beberapa kecamatan di pulau Adonara yaitu Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Wotanulumado, Adonara Tengah, Adonara Barat dan Adonara.

⁴ Karmila,(2017) Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa. Program Studi PMI Kesejahteraan Sosial.Fakultas Dakwah dan Komunikasi.Universitas Negri Alaluddin Makasar.Halaman 1.

Bencana ini diakibatkan oleh Siklon Tropis Seroja yang menerjang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya dan Kabupaten Flores Timur khususnya. Siklon Tropis Seroja ini menyebabkan tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Flores Timur yang mengakibatkan rusaknya vegetasi alam di daerah hulu sungai, berubahnya fungsi/tata guna lahan di daerah resapan/penampung air seperti lahan gambut, hutan, bukit-bukit pegunungan serta berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung debit air sebagai akibat perubahan pola tata ruang dan sedimentasi di bagian hulu atau hilirnya yang tidak terkendali disinyalir juga ikut andil dalam menyebabkan banjir bandang yang sangat besar.

Berdasarkan infografis resmi Kabupaten Flores Timur yang dirilis oleh Bidang Pendataan Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, tercatat ada 8.577 KK terdampak, 26.327 jiwa terdampak, 3.180 jiwa harus mengungsi, 74 jiwa penduduk meninggal (2 belum ditemukan), 5 tempat ibadah terdampak, 6 sekolah terdampak, 2 kantor terdampak, 8 jembatan terdampak, 7 titik jalan terdampak, 458 buah rumah rusak, 3 fasilitas kesehatan terdampak, 52 jiwa terpaksa harus dirawat jalan dan 28 jiwa harus dirawat inap. (Bidang Pendataan Pos Komando Kabupaten Flores Timur tanggal, 04 april 2021).⁵Untuk lebih jelas data terkait hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵Laporan ancaman bencana/Kejadian Bencana No BPBD. 360/106/Bid.KI/2021.

Tabel 1.1

Data Kerusakan Rumah Pasca Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin
Kencang Akibat Badai Seroja di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Tingkat Kerusakan			Total
		Ringan	Sedang	Berat	
1.	Adonara	8	-	20	28
2.	Adonara Barat	17	6	16	39
3.	Adonara Tengah	3	2	3	8
4.	Adonara Timur	115	14	113	242
5.	Ile Boleng	28	1	66	95
6.	Kelubagolit	-	4	2	6
7.	Wotan Ulumado	26	0	14	40
	Jumlah	197	27	234	458

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Flores Timur/2021

Dari data di atas, Kecamatan Adonara Timur merupakan daerah dengan tingkat kerusakan rumah terparah dan paling banyak dengan jumlah 242 kerusakan rumah dan tingkat kerusakan paling sedikit di Kecamatan Kelubagolit dengan jumlah 6 kerusakan rumah, sedangkan jumlah korban untuk Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Data Korban Akibat Banjir Bandang dan Angin Kencang di Desa Waiburak
Kecamatan Adonara Timur Akibat Badai Siklon Seroja

NO	Keterangan	Jumlah
1	Korban meninggal	10 orang
2	Korban yang belum ditemukan	-
3	Korban luka-luka	17 orang
4	Sudah sembuh	9 orang
5	Masih dalam perawatan	8 orang

Sumber: Bupati Flores Timur, Laporan Ancaman/Kejadian Bencana Nomor:

BPBD.360/106/Bid.KL/2021.

Berdasarkan data jumlah korban diatas perlu adanya penanganan pemulihan trauma oleh pihak-pihak spesialis psikolog sehingga korban benar-benar sembuh dari trauma dan dapat menjalankan kehidupan sehari-hari seperti sebelum terjadinya bencana. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan berfokus pada beberapa aspek substansif rekonstruksi dan rehabilitasi yang belum terselesaikan sampai saat ini yaitu aspek perumahan dan pemukiman, aspek pembangunan infrastruktur yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perumahan bagi masyarakat terdampak dan pembangunan kembali prasarana dan sarana di daerah bencana.

Dalam upaya pembangunan rumah Pemerintah Pusat dan BPBD Kabupaten Flores Timur telah membangun 195 unit rumah di Kecamatan Adonara Timur dan 64 rumah untuk Desa Waiburak yang ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun 2021, namun sesuai dengan pengamatan awal penelitian di lapangan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi belum berjalan maksimal seperti proses pengerjaan rumah korban bencana yang belum terselesaikan dan jembatan yang menjadi penghubung dari Desa Waiburak ke Kota Waiwerang yang menjadi satu-satunya pusat perekonomian sebagian besar masyarakat adonara masih menggunakan jembatan darurat, sehingga jembatan tersebut tidak bisa dilintasi truk-truk besar yang sangat berpengaruh pada terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat dan aktivitas sosial lainnya.

Mengingat bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional maka Penanganan bencana ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Sumber Dana untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan pekerjaan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pemerintah Daerah dishare/diberikan kewenangannya untuk melakukan koordinasi, memonitoring dan kewenangan lainnya. Sedangkan tugas koordinasi pemerintah daerah dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Flores Timur.

Dari semua program pemulihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rekonstruksi dan rehabilitasi dapat diamati dari tampilan data-data jumlah kerusakan yang menunjukkan ada pembangunan fisik yang belum terselesaikan, peneliti menduga bahwa Peran Koordinasi BPBD belum berjalan optimal, sehingga penelitian ini berusaha untuk mencari tahu dan mengkaji lebih dalam Peran Koordinasi yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan pasca bencana, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERAN KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI DESA WAIBURAK KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Koordinasi yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam program Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Menggambarkan Peran Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dalam Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang belum terselesaikan pasca Banjir Bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur tahun 2021.
2. Mengetahui/menganalisis Peran Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca banjir bencana bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi publik dan menjadi acuan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Peran Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pasca bencana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan

programRekonstruksi dan Rehabilitasi pasca banjir Bandang di Desa
Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tahun
2021.